



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) merupakan dokumen rencana daerah yang mana terdapat penyesuaian – penyesuaian dengan keadaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan sehingga berperan vital dalam mengarahkan program kegiatan serta subkegiatan pelayanan Perangkat Daerah satu tahun kedepan. Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat rencana pelayanan baik kepada masyarakat maupun pada sesama Perangkat Daerah lainnya yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan adanya perubahan terhadap agenda pembangunan yang lebih mengedepankan pada pencapaian kesejahteraan dan pemerintahan yang berdayasaing, maka untuk menghadapi tantangan dan perubahan di tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan strategi sebagai upaya pencapaian sasaran telah merumuskan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024 kedalam 5 (Lima) Program dengan sumberdana berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat serta Dana Alokasi Khusus / DAK Non Fisik Penanaman Modal.

Melalui Penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini diharapkan sasaran Perangkat Daerah akan tercapai.

Liwa , 01 April 2024
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DAMIAN NASIR.,M.P
Pemimpin Muda
N.P. 19680701 198901 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	13
BAB IV PENUTUP	14

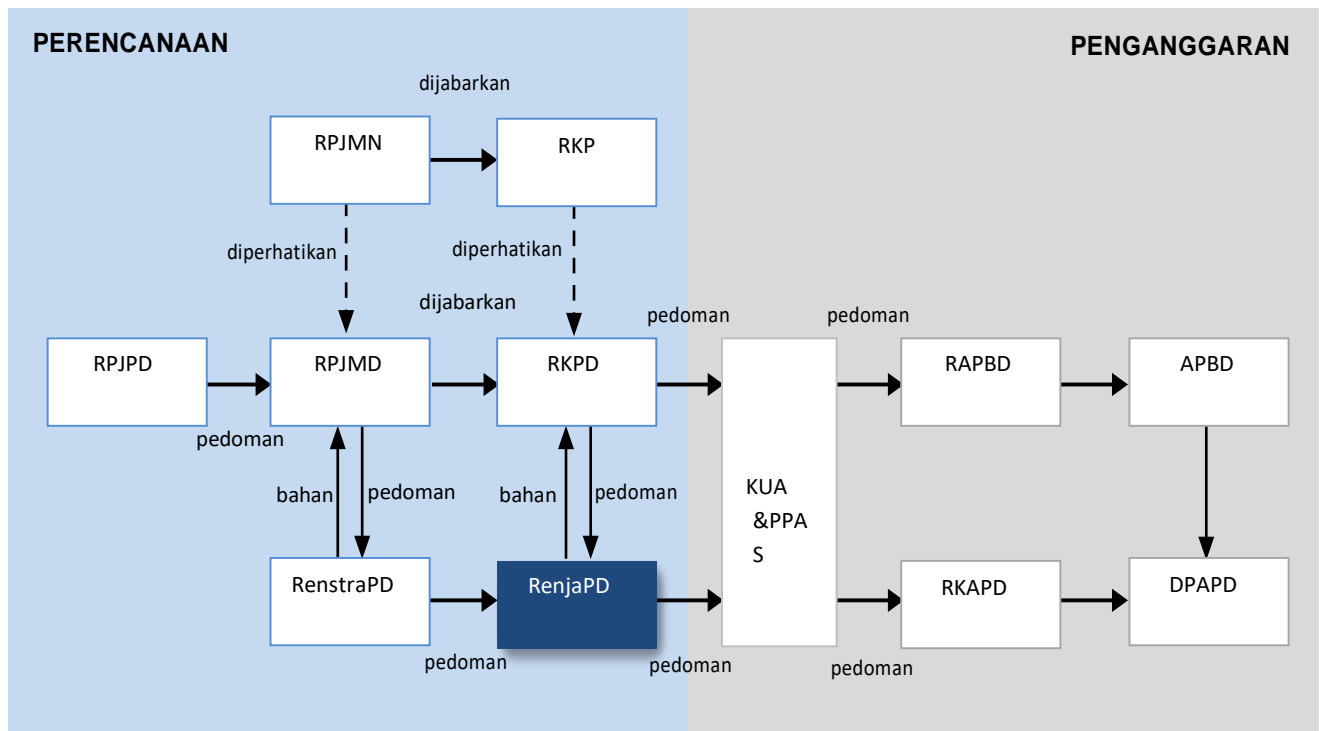
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat(11) yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ininantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Adanya kondisi luar biasa yaitu Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dilandasi oleh beberapa aturan hukum yang mengatur keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang pedoman nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal;
 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 tahun 2010;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2018 Tentang RPJMD 2017 – 2024;

20. Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat secara berkesinambungan.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan aktifitas di Kabupaten Lampung Barat, sehingga terwujud sinergitas antar pelaku dan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan perlu dibuatnya Renja Perubahan adalah sebagai berikut.

1. Untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah;
2. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan sehingga terjadi pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran;

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat / menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

4. BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

5. LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024

Proses penyusunan suatu perencanaan erat hubungannya dengan proses evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi dapat mengidentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi itu sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan untuk tahun-tahun mendatang.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan I.
- Memperhatikan pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat dengan indikator Jumlah Investasi PMDN/PMA Rp. 99,75 Milyar
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu A (91 Point)

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah

program termasuk program rutin sebanyak 5 (Lima) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 12 (Dua belas) kegiatan serta 33 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2024 untuk Belanja sebesar Rp. 3.452.654.300,- terealisasi sebesar Rp. 382.131.968,- atau 11,00 persen.

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 31 subkegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen pada triwulan I yaitu :

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi fisik / output sebesar 3 Dokumen dari target 8 Dokumen atau 38 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 dari target 1 Dokumen atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 dari target 1 Dokumen atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
4. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA realisasi fisik/output sebesar 0 dari target 1 Dokumen atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
5. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 dari target 1 Dokumen atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
6. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja realisasi fisik/output sebesar 0 dari target 1 Laporan atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
7. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi fisik/output sebesar 3 Laporan dari target 12 Laporan atau 25 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
8. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi fisik/output sebesar 19 dari target 22 Orang/bulan atau 89 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena adanya pegawai yang mutasi.

9. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 laporan dari target 1 laporan atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
10. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 dari target 17 laporan atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
11. Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran realisasi fisik/output sebesar 0 Dokumen dari target 1 Dokumen atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
12. Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 Dokumen dari target 1 Dokumen atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
13. Subkegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai realisasi fisik/output sebesar 0 Dokumen dari target 1 Dokumen atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
14. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi fisik/output sebesar 0 orang dari target 4 orang atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
15. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi fisik/output sebesar 1 Paker dari target 2 Paket atau 50 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
16. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi fisik / output sebesar 0 Paket dari target 1 Paket atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
17. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu realisasi fisik / output sebesar 3 Laporan dari target 12 Laporan atau 25 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
18. Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi fisik / output sebesar 3 Laporan dari target 12 Laporan atau 25 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.

19. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya realisasi fisik / output sebesar 6 unit dari target 8 unit atau 75 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
20. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik / output sebesar 3 Laporan dari target 12 Laporan atau 25 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
21. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik / output sebesar 3 Laporan dari target 12 Laporan atau 25 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
22. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi fisik / output sebesar 3 Laporan dari target 12 Laporan atau 25 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
23. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi fisik / output sebesar 1 Unit dari target 11 Unit atau 9 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
24. Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi fisik / output sebesar 0 unit dari target 1 unit atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
25. Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota, realisasi fisik / output sebesar 0 Dokumen dari target 1 Dokumen atau 0 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
26. Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik, realisasi fisik / output sebesar 500 Pelaku Usaha dari target 1500 Pelaku Usaha atau 33 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
27. Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, realisasi fisik / output sebesar 50 pelaku usaha dari target 150 pelaku usaha atau 33 persen. Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
28. Subkegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, realisasi fisik / output sebesar 10 kegiatan usaha dari target 30 kegiatan usaha atau 33 persen. Realisasi fisik

/ output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.

29. Subkegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha,realisasi fisik / output sebesar 0 dari target 172 Pelaku Usaha atau persen.Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena penataan subkegiatan dan rincian belanja sesuai Juknis DAK Non-Fisik .
30. Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal,realisasi fisik / output sebesar 0 dari target 11 Kegiatan Usaha atau persen.Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena penataan subkegiatan dan rincian belanja sesuai Juknis DAK Non-Fisik.
31. Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronikm realisasi fisik / output sebesar 0 Dokumen dari target 1 Dokumen atau 0 persen.Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program , Kegiatan dan Subkegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab III ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan OPD yang menangannya.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD Perubahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

Adapun rincian Rencana Program , Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni tahun 2024 sebesar Rp. 5.440.528.960,-
2. Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 3.452.654.300,-
3. Jumlah subkegiatan yang bertambah pagunya pada Renja Perubahan tahun 2024 dibandingkan APBD Murni sebanyak 6 subkegiatan.
4. Jumlah subkegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2024 dibandingkan APBD Murni sebanyak 2 subkegiatan.
5. Jumlah subkegiatan yang baru muncul pada Renja Perubahan tahun 2024 dibandingkan dengan APBD Murni sebanyak 1 subkegiatan.
6. Jumlah Subkegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan tahun 2024 dibandingkan APBD Murni sebanyak 0 subkegiatan.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat 2024–2026 dalam menunjang tercapainya target dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2024.

Demikian perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan renja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama, mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

LIWA , 01 APRIL 2024
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DAMAN NASIR.,M.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680701 198901 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	%			K	%			
																											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target
1					2		3		4		5		6		7		8			9			10= 9 / 4	12	13				
02					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN																								
02	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		36.279.194.101		3.028.714.656		3.473.454.300										3.028.714.656								
02	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Point	22.575.266.434	82.61	Point	1.968.036.889	79	Point	2.453.603.300	79	Point	100%	100%	Point	0%	79	Point	1.968.036.890	161.61	Point	2.02%	DPMPTSP	
02	18	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38	Dokumen	151.586.308	11	Dokumen	18.163.000	8	Dokumen	18.680.400	3	Dokumen	38%	38%	Dokumen	0%	14	Dokumen	18.163.000	14	Dokumen	37%	DPMPTSP	
						Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	20			4	Dokumen		5	Dokumen		0	Dokumen	0%	0%	Dokumen		4	Dokumen		4	Dokumen	20%	DPMPTSP	
						Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48			13	Laporan		12	Laporan		3	Laporan	25%	25%	Laporan		16	Laporan		16	Laporan	33%	DPMPTSP	
02	18	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	38	Dokumen	21.051.149	11	Dokumen	4.340.000	8	Dokumen	4.346.000	3	Dokumen	38%	38%	Dokumen	0%	14	Dokumen	4.340.000	14	Dokumen	37%	DPMPTSP	
02	18	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	11.904.721	1	Dokumen	1.846.100	1	Dokumen	1.847.800	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	1.846.100	1	Dokumen	25%	DPMPTSP	
02	18	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	11.665.737	1	Dokumen	1.809.000	1	Dokumen	1.845.200	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	1.809.000	1	Dokumen	25%	DPMPTSP	
02	18	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	10.482.415	1	Dokumen	1.625.300	1	Dokumen	1.627.000	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	1.625.300	1	Dokumen	25%	DPMPTSP	
02	18	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	10.184.170	1	Dokumen	1.579.000	1	Dokumen	1.759.800	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	1.579.000	1	Dokumen	25%	DPMPTSP	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP s.d Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	%	K			%			
																											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
02	18	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	12.687.376	1	Laporan	1.966.600	1	Laporan	2.254.800	0	Laporan	0%	0%	Laporan	0%	1	Laporan	1.966.600	1	Laporan	25%	DPMPTSP	
02	18	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Laporan	73.610.740	12	Laporan	4.997.000	12	Laporan	4.999.800	3	Laporan	25%	25%	Laporan	0%	15	Laporan	4.997.000	15	Laporan	31%	DPMPTSP	
02	18	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Reliasasi Anggaran	4	Dokumen	14.420.905.193	1	Dokumen	1.660.618.074	1	Dokumen	2.096.224.000	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	1.660.618.074	1	Dokumen	25%	DPMPTSP	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		0	Laporan	0%	0%	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	25%	DPMPTSP	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Twirulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	68	Laporan		17	Laporan		17	Laporan		0	Laporan	0%	0%	Laporan		17	Laporan		17	Laporan	25%	DPMPTSP	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang		21	Orang		22	Orang		19	Orang	86%	86%	Orang		40	Orang		40	Orang	138%	DPMPTSP	
02	18	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang	14.389.319.228	21	Orang	1.652.312.074	22	Orang	2.087.293.000	19	Orang	86%	86%	Orang	0%	28	Orang	1.652.312.075	40	Orang	138%	DPMPTSP	
02	18	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	Laporan	14.355.952	1	Laporan	2.498.000	1	Laporan	2.690.000	0	Laporan	0%	0%	Laporan	0%	1	Laporan	2.498.000	1	Laporan	25%	DPMPTSP	
02	18	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Twirulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Twirulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	5.745.251	17	Laporan	3.810.000	17	Laporan	4.101.200	0	Laporan	0%	0%	Laporan	0%	1	Laporan	3.810.000	17	Laporan	425%	DPMPTSP	
02	18	01	2	02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Reliasasi Anggaran	4	Dokumen	11.484.762	1	Dokumen	1.998.000	1	Dokumen	2.139.800	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	1.998.000	1	Dokumen	25%	DPMPTSP	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s.d Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	K			%	12	13	
																													Realisasi Kinerja Renja
1					2		3		4		5		6		7		8		9			9=5+7		10=9/4					
02	18	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	4	Dokumen	31.311.200	1	Dokumen	6.413.500	1	Dokumen	6.952.800	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	6.413.500	1	Dokumen	25%	DPMPTSP	
02	18	1	2	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	4	Dokumen	31.311.200	1	Dokumen	6.413.500	1	Dokumen	6.952.800	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	6.413.500	1	Dokumen	25%	DPMPTSP	
02	18	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	Dokumen	95.400.000	1	Dokumen	4.194.900	1	Dokumen	24.138.600	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	4.194.900	1	Dokumen	25%	DPMPTSP	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	Orang			Orang	4	Orang		0	Orang	0%	0%	Orang		0	Orang		0	Orang	0%	DPMPTSP		
02	18	1	2	01	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	Dokumen	20.700.000	1	Dokumen	4.194.900	1	Dokumen	4.138.600	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	4.194.900	1	Dokumen	25%	DPMPTSP	
02	18	01	2	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	Orang	74.700.000		Orang		4	Orang	20.000.000	0	Orang	0%	0%		0%	0	Orang		0		0%	DPMPTSP	
02	18	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	820.811.145	2	Paket	100.948.118	2	Paket	98.435.200	1	Paket	50%	50%	Dokumen	0%	3	Paket	100.948.119	3	Dokumen	75%	DPMPTSP	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			Paket		0	Paket		0	Paket	0%	Paket		0	Paket		0	Paket	#DIV/0!	DPMPTSP		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			Paket		0	Paket		0	Paket	0%	Paket		0	Paket		0	Paket	#DIV/0!	DPMPTSP		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket		2	Laporan		1	Laporan		0	Laporan	0%	0%	Laporan		2	Laporan		2	Laporan	25%	DPMPTSP	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen		5	Dokumen		5	Dokumen		5	Dokumen	100%	100%	Dokumen		10	Dokumen		10	Dokumen	200%	DPMPTSP	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		3	Laporan	25%	25%	Laporan		15	Laporan		15	Laporan	125%	DPMPTSP	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		3	Laporan	25%	25%	Laporan		15	Laporan		15	Laporan	125%	DPMPTSP	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	%			12	13			
																											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=9/4	11	12	13																	
02	18	01	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	11.680.001	2	Paket	2.054.000	2	Paket	2.678.000	1	Paket	50%	50%	Paket	0%	3	Paket	2.054.001	3	Paket	75%	DPMPTSP	
02	18	01	2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	6.491.387		Paket		0	Paket	0	0	Paket	0%	0%	0	Paket	0	0	0	0	0	0%	DPMPTSP	
02	18	01	2	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	7.490.062		Paket		0	Paket	0	0	Paket	0%	0%	0	Paket	0	0	0	0	0	0%	DPMPTSP	
02	18	01	2	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	173.722.590	2	Paket	16.033.400	1	Paket	16.510.000	0	Paket	0%	0%	Paket	0%	2	Paket	16.033.400	2	Paket	25%	DPMPTSP	
02	18	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	27.907.971	5	Dokumen	4.860.000	5	Dokumen	5.760.000	5	Dokumen	100%	100%	Dokumen	0%	10	Dokumen	4.860.001	10	Dokumen	200%	DPMPTSP	
02	18	01	2	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	29.148.326	12	Laporan	5.316.000	12	Laporan	5.500.000	3	Laporan	25%	25%	Laporan	0%	15	Laporan	5.316.000	15	Laporan	125%	DPMPTSP	
02	18	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	551.996.808	12	Laporan	72.684.718	12	Laporan	67.987.200	3	Laporan	25%	25%	Laporan	0%	15	Laporan	72.684.718	15	Laporan	125%	DPMPTSP	
02	18	01	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48	Dokumen	6.187.000																	0%			
02	18	01	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	6.187.000																	0%			
02	18	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	Unit	1.738.600.000	2	Unit	3.600.000	8	Unit	20.800.000	6	Unit	75%	75%	Unit	0%	8	Unit	3.600.001	8	Unit	22%	DPMPTSP	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Diadakan	1	Unit			Unit			Unit			0%	Unit		0	Unit		0	Unit	0%	DPMPTSP			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57	Unit			Unit		0	Unit		0	Unit	0%	Unit		0	Unit		0	Unit	0%	DPMPTSP		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit			Unit		0	Unit		0	Unit	0%	Unit		0	Unit		0	Unit	0%	DPMPTSP		
						Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	4	Unit			Unit		0	Unit		0	Unit	0%	Unit		0	Unit		0	Unit	0%	DPMPTSP		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	%	K			%		
																											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=9/4	11	12	13																
02	18	01	2	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Diadakan	1	Unit	355.000.000						0%					0		0%	DPMPTSP					
02	18	01	2	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Set	508.800.000		0	Unit	0	0	Unit	0%	0%	0	Unit	0	0	0%	DPMPTSP					
02	18	01	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	564.800.000	2	Unit	3.600.000	8	Unit	20.800.000	6	Unit	75%	75%	Unit	0%	8	Unit	3.600.001	8	Unit	40%	DPMPTSP
02	18	01	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	270.000.000		Unit		0	Unit	0	0	Unit	0%	0%	0	Unit	0	0	0%	DPMPTSP			
02	18	01	2	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1	Unit	40.000.000		Unit		0	Unit	0	0	Unit	0%	0%	0	Unit	0	0	0%	DPMPTSP			
02	18	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	4.159.859.822	12	Laporan	102.856.559	12	Laporan	116.712.300	3	Laporan	25%	25%	Laporan	0%	15	Laporan	102.856.559	15	Laporan	31%	DPMPTSP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		3	Laporan	25%	25%	Laporan		15	Laporan		15	Laporan	31%	DPMPTSP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		3	Laporan	25%	25%	Laporan		15	Laporan		15	Laporan	31%	DPMPTSP
02	18	01	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7.953.195	12	Laporan	1.625.000	12	Laporan	1.725.000	3	Laporan	25%	25%	Laporan	0%	15	Laporan	1.625.000	15	Laporan	125%	DPMPTSP
02	18	01	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3.288.360.596	12	Laporan	16.210.859	12	Laporan	22.559.800	3	Laporan	25%	25%	Laporan	0%	15	Laporan	16.210.859	15	Laporan	125%	DPMPTSP
02	18	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	863.546.031	12	Laporan	85.020.700	12	Laporan	92.427.500	3	Laporan	25%	25%	Laporan	0%	15	Laporan	85.020.700	15	Laporan	125%	DPMPTSP
02	18	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	1.156.792.766	1	Unit	71.242.738	1	Unit	71.660.000	0	Unit	0%	0%	Unit	0%	1	Unit	71.242.738	1	Unit	50%	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	%	K			%		
																											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
02	18	01	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan Pajak	11	Kendaraan		Unit	0	Unit	0	Unit	#DIV/0!	#DIV/0!	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	DPMPTSP				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	11	Unit	11	Unit	11	Unit	100%	100%	Unit	22	Unit	22	Unit	200%	DPMPTSP					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	10	Unit	11	Unit	1	Unit	9%	9%	Unit	11	Unit	11	Unit	122%	DPMPTSP					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang	2	Unit		Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0%	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	DPMPTSP					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang	1	Unit		Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0%	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	DPMPTSP					
02	18	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	721.083.297	11	Unit	53.845.488	11	Unit	54.300.000	11	Unit	100%	100%	Unit	0%	22	Unit	53.845.489	22	Unit	200%	DPMPTSP
02	18	01	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	68.140.094	10	Unit	7.160.000	11	Unit	7.910.000	1	Unit	9%	9%	Unit	0%	11	Unit	7.160.000	11	Unit	122%	DPMPTSP
02	18	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	324.569.375	1	Unit	10.237.250	1	Unit	9.450.000	0	Unit	0%	0%	Unit	0%	1	Unit	10.237.250	1	Unit	50%	DPMPTSP
02	18	01	2	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2	Unit	10.750.000		Unit		0	Unit	0	Unit	0%	0%	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	DPMPTSP
02	18	01	2	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1	Unit	32.250.000		Unit		0	Unit	0	Unit	0%	0%	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	DPMPTSP
02	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20	%	950.000.000		%		0	%	0	%		0%	%	0%	0%	20	%	0	%	0%	DPMPTSP	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	%			K	%
1	2	3	4	5	6	7	8= 7 / 6	9	10= 9 / 4	11	12	13														
02	18	02	2		Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	9	Kegiatan Usaha	950.000.000			0		0		0%		0%	0		0		0%	DPMPTSP		
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2	Dokumen				0	Kegiatan Usaha	0	Kegiatan Usaha	0%	Kegiatan Usaha	0%	1	Kegiatan Usaha	0	Kegiatan Usaha	0%	DPMPTSP		
02	18	03	2	01	Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	Dokumen	630.000.000			0		0		0%		0%	0		0		0%	DPMPTSP		
02	18	02	2	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	9	Kegiatan Usaha	320.000.000			0	Kegiatan Usaha	0	Kegiatan Usaha	0%	Kegiatan Usaha	0%	1	Kegiatan Usaha	0	Kegiatan Usaha	0%	DPMPTSP		
02	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	20	%	8.563.800.000	109	%	379.232.687	15	%	350.000.000		%	0%	0%	15	%	379.232.687	109	%	545%	DPMPTSP
02	18	03	2		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	Dokumen	8.563.800.000	1	Dokumen	379.232.687	1	Dokumen	350.000.000		Dokumen	0%	0%	1	Dokumen	379.232.687	1	Dokumen	25%	DPMPTSP
						Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Dokumen				0	Dokumen	0	Dokumen	0%	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	DPMPTSP		
02	18	03	2	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	210.000.000			0	Dokumen	0	Dokumen	0%		0%	0	Dokumen	0		0%	DPMPTSP		
02	18	03	2	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	10	Dokumen	8.353.800.000	1	Dokumen	379.232.687	1	Dokumen	350.000.000		Dokumen	0%	0%	1	Dokumen	379.232.687	1	Dokumen	10%	DPMPTSP
02	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100	%	2.283.950.590	100	%	224.694.300	100	%	220.673.000	100	%	100%	100%	100	%	224.694.301	200	%	200%	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
02	18	04	2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	7.020	Pelaku Usaha	2.283.950.590	3.930	Pelaku Usaha	224.694.300			0%	Pelaku Usaha	0%	3.930	Pelaku Usaha	224.694.300			DPMPTSP	
						Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	270	Kegiatan Usaha		58	Kegiatan Usaha				0%	Kegiatan Usaha		58	Kegiatan Usaha				DPMPTSP	
						Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	51	Orang			Orang				0%	Orang		0	Orang				DPMPTSP	
						Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	9	Kegiatan Usaha			Kegiatan Usaha				0%	Kegiatan Usaha		0	Kegiatan Usaha				DPMPTSP	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7020	Pelaku Usaha			1.500	Pelaku Usaha		500	Pelaku Usaha	33%					500		7%	
						Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	Orang			150	Orang		50	Orang	33%					50		250%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			K	%				
																									Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
						60	Kegiatan Usaha			30	Kegiatan Usaha			10	Kegiatan Usaha	33%					10	17%						
02	18	04	2	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7.020	Pelaku Usaha	485.090.000	3.930	Pelaku Usaha	178.138.300	0	Pelaku Usaha	0									DPMPTSP				
02	18	04	2	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan Penanaman Modal	60	Kegiatan Usaha	73.565.000	58	Kegiatan Usaha	46.556.000												DPMPTSP				
02	18	04	2	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	Orang	25.950.000	0	Orang	0												DPMPTSP				
02	18	04	2	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	9	Kegiatan Usaha	145.120.900	0	Kegiatan Usaha	0												DPMPTSP				
02	18	04	2	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6620	Pelaku Usaha	1.191.890.590				1.500	Pelaku Usaha	167.088.000	500	Pelaku Usaha	33%	33%	Pelaku Usaha	0%	500	Pelaku Usaha	0	500	Pelaku Usaha	8%	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026			Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023			Target Kinerja DPA Tahun 2024			Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	%	K			%		
																											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
02	18	04	2	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	525	Pelaku Usaha	94.483.950			150	Pelaku Usaha	20.000.000	50	Pelaku Usaha	33%	33%	Pelaku Usaha	0%	50	Pelaku Usaha	0	50	Pelaku Usaha	10%	DPMPTSP	
02	18	04	2	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	210	Kegiatan Usaha	267.850.150			30	Kegiatan Usaha	33.585.000	10	Kegiatan Usaha	33%	33%	Pelaku Usaha	0%	10	Pelaku Usaha	0	10	Kegiatan Usaha	5%		
02	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	100	%	1.605.772.077	100	%	423.636.600	85	%	415.178.000	85	%	100%	100%	%	0%	85	%	423.636.601	185	%	185%	DPMPTSP
02	18	05	2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	37	Kegiatan Usaha	1.605.772.077		Kegiatan Usaha	423.636.600						0%	Kegiatan Usaha	0%	0	Kegiatan Usaha	423.636.600				DPMPTSP	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	840	Pelaku Usaha		180	Pelaku Usaha							0%	Pelaku Usaha		180	Pelaku Usaha					DPMPTSP	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	57	Kegiatan Usaha		25	Kegiatan Usaha							0%	Kegiatan Usaha		25	Kegiatan Usaha					DPMPTSP	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)						172	Pelaku Usaha		0	Pelaku Usaha	0%	0%					0			#DIV/0!		
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan						11	Kegiatan Usaha		0	Kegiatan Usaha	0%	0%					0			#DIV/0!		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			K	%			
																									Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target
1	2	3	4	5	6	7	8= 7 / 6	9	9= 5 + 7	10= 9 / 4	12	13															
02	18	05	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal	37	Kegiatan Usaha	224.160.300		Kegiatan Usaha											DPMPPTSP					
02	18	05	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210	Pelaku Usaha	216.822.000	180	Pelaku Usaha	394.222.600											DPMPPTSP				
02	18	05	2	03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	13	Kegiatan Usaha	80.875.000	25	Kegiatan Usaha	29.414.000											DPMPPTSP				
02	18	05	2	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha BerbasisRisiko (Pelaku Usaha)	630	Pelaku Usaha	789.448.902			172	Pelaku Usaha	300.000.000	0	Pelaku Usaha	0%	0%			0	0%					
02	18	05	2	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari PelakuUsaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatanusaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan	44	Kegiatan Usaha	294.465.875			11	Kegiatan Usaha	115.178.000	0	Kegiatan Usaha	0%	0%			0	0%					
02	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPPTSP	100	%	300.405.000	100	%	33.114.180	100	%	34.000.000	100	%	100%	100%	0%	100	%	33.114.181	200	%	200%	DPMPPTSP
02	18	06	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	300.405.000	1	Dokumen	33.114.180			0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	33.114.180					DPMPPTSP		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023		Target Kinerja DPA Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s.d Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	K	%			12	13			
																											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	9=5+7	10=9/4	11	12	13																
02	18	06	2	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	72.000.000	1	Dokumen	33.114.180	0		0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	33.114.180	0		0%			DPMPTSP			
02	18	06	2	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3	Dokumen	228.405.000				1	Dokumen	34.000.000	0	Dokumen	0%	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	0	Dokumen	0%	DPMPTSP	

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Alasan Perubahan	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja				NASIONAL					DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja									
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.440.528.960	3.473.454.300	3.708.255.300								9.229.562.204	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP (%)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP (%)	79.00	79.00	2.627.872.260	2.453.603.300	2.514.888.300				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	4. Reformasi Birokrasi			6.131.349.784	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (Dokumen) Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (Dokumen) Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	8 5 12	8 5 12	25.729.000	18.680.400	18.680.400		(Balik Bukit, Balik Bukit) (Balik Bukit, Balik Bukit) (Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	4. Reformasi Birokrasi		11 5 12	40.663.987	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.00	8.00	4.700.000	4.346.000	4.346.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	11.00	5.647.104	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	2.340.000	1.847.800	1.847.800		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	1.00	3.193.517	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	2.095.000	1.845.200	1.845.200		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	1.00	3.129.408	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	2.135.000	1.627.000	1.627.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	1.00	2.811.974	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	2.010.000	1.759.800	1.759.800		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	1.00	2.731.968	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Alasan Perubahan	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja				NASIONAL					DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja									
2.18.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	1.00	2.255.000	2.254.800	2.254.800		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	1.00	3.403.469	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12.00	12.00	10.194.000	4.999.800	4.999.800		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	12.00	19.746.547	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	22 1	22 1	2.134.083.460	2.096.224.000	2.096.224.000		(Balik Bukit, Balik Bukit) (Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi		28 1	3.819.390.115	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	17 1	17 1					(Balik Bukit, Balik Bukit) (Balik Bukit, Balik Bukit)					17 1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22.00	22.00	2.124.936.860	2.087.293.000	2.087.293.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	28.00	3.811.024.543	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	1.00	2.750.000	2.690.000	2.690.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	1.00	3.802.187	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					4.196.500	4.101.200	4.101.200			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi			1.521.635	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Alasan Perubahan	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja				NASIONAL	DAERAH					
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja										
2.18.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (Unit)	9	10				Penambahan 1 Unit Laptop untuk mendukung Kegiatan administrasi perkantoran	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Abokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berkualitas Sains	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			131.169.200	116.712.300	130.887.300				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi		1.731.245.423		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12					(Balik Bukit, Balik Bukit)					12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12	12					(Balik Bukit, Balik Bukit)					12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12	12					(Balik Bukit, Balik Bukit)					12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.725.000	1.725.000	1.725.000			Dana Transfer Umum-Dana Abokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	aparatur		2.106.411		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12.00	12.00					(Balik Bukit, Balik Bukit)					12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					22.560.000	22.559.800	36.734.800	Penambahan kapasitas bandwidth Sarana Internet untuk Persiapan MPP Digital		Dana Transfer Umum-Dana Abokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	aparatur		1.500.428.045		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00					(Balik Bukit, Balik Bukit)					12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					106.884.200	92.427.500	92.427.500			Dana Transfer Umum-Dana Abokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	aparatur		228.710.967		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00					(Balik Bukit, Balik Bukit)					12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.710.000	71.660.000	71.660.000				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi			294.989.047		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11					(Balik Bukit, Balik Bukit)					11		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	11	11					(Balik Bukit, Balik Bukit)					9		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Alasan Perubahan	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja				NASIONAL					DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja									
2.18.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (Unit)	1	1					(Balik Bukit, Balik Bukit)					2		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11.00	11.00	103.350.000	54.300.000	54.300.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	11.00	190.979.580	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11.00	11.00	7.910.000	7.910.000	7.910.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	9.00	18.046.967	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Minat Investasi (%)	Persentase Peningkatan Minat Investasi (%)	15	15	1.900.000.000	350.000.000	350.000.000				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Reformasi Birokrasi			2.178.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal (Dokumen)	Jumlah Promosi Penanaman Modal (Dokumen)	3	3	1.900.000.000	350.000.000	350.000.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Reformasi Birokrasi		3	2.178.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.00	3.00	1.900.000.000	350.000.000	350.000.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Investor dan Calon Investor	1.00	2.178.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang terbit sesuai dengan standar layanan (%)	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang terbit sesuai dengan standar layanan (%)	100	100	498.060.000	220.673.000	352.673.000				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi			483.899.050	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Alasan Perubahan	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja				NASIONAL					DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja									
2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2000	2000	498.060.000	220.673.000	352.673.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi			483.899.050	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha secara Elektronik (Pelaku Usaha) (Kegiatan Usaha)	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha secara Elektronik (Pelaku Usaha) (Kegiatan Usaha)	65	65					(Balik Bukit, Balik Bukit)						70	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) (Orang)	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) (Orang)	150	150					(Balik Bukit, Balik Bukit)						165	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2000	2000	398.600.000	167.088.000	299.088.000	Persiapan Pelaksanaan MPP Digital (Sarana dan Prasarana)	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	masyarakat		363.485.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko					25.700.000	20.000.000	20.000.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi			31.399.500	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	150	150					(Balik Bukit, Balik Bukit)				masyarakat		165	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	65	65	73.760.000	33.585.000	33.585.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	masyarakat		89.013.650	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. 2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					380.596.700	415.178.000	456.694.000				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	4. Reformasi Birokrasi			360.213.370	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Alasan Perubahan	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja				NASIONAL					DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja									
			<i>Persentase layanan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPSTP (%)</i>	<i>Persentase layanan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPSTP (%)</i>	100	100											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen data Investasi dan Realisasi Perizinan (Dokumen)</i>	<i>Jumlah Dokumen data Investasi dan Realisasi Perizinan (Dokumen)</i>	1	1	34.000.000	34.000.000	34.000.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Reformasi Birokrasi		1	76.100.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)</i>	1.00	1.00	34.000.000	34.000.000	34.000.000		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat, Investor dan Calon Investor	1.00	76.100.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu